

hasil yang sistematis dan struktur agar dapat mempermudah pembaca dalam mengikuti arah pembahasan dan menyerap sajian penelitian ini, maka dari itu peneliti ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing dari setiap bab saling terhubung yang menggambarkan isi skripsi antara lain :

1. Bab I Pendahuluan : bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka : berisikan teori yang digunakan dalam penelitian dan tinjauan Pustaka dari beberapa penelitian terdahulu.
3. Bab III Metode Penelitian : berisikan bab yang memuat metodologi penelitian dan penelitian metode yang digunakan dalam penelitian ini.
4. Bab IV hasil dan Pembahasan : berisikan bab yang menyajikan hasil temuan berupa data yang menjelaskan hasil analisis.
5. Bab V Penutup: berisikan bab terakhir sekaligus bab penutup yang terdiri dari hasil kesimpulan penelitian ini.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki kedaulatan untuk melindungi dan mempertahankan wilayahnya, dan pemerintah berusaha menjaga keamanan negara melalui hubungan diplomasi dengan negara tetangga. Meskipun demikian, konflik antar negara tetangga kerap terjadi dan sulit dihindari dalam kancah internasional. Perang menjadi momok yang sangat ditakuti karena menimbulkan berbagai kerugian tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional. Korban perang tidak hanya berasal dari kalangan militer, tetapi masyarakat sipil pun banyak yang terdampak, mengalami penderitaan berupa kehilangan nyawa, trauma psikologis, kerusakan harta benda, serta terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi mereka.

Konflik antara koalisi Arab Saudi dan Yaman dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah kepentingan ekonomi. Konflik ini bermula dari konflik internal Yaman yang didasarkan pada masalah teologis dan perebutan kekuasaan di dalam negeri. Arab Saudi terlibat dalam konflik ini karena kepentingannya untuk mempertahankan akses strategis Selat Bab el-Mandeb yang merupakan jalur penting ekspor-impor minyaknya. Kelompok pemberontak Houthi yang menguasai selat tersebut mendapat dukungan persenjataan dari Iran, yang menyebabkan Arab Saudi menganggap keberadaan Houthi sebagai ancaman terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan nasionalnya di wilayah tersebut. Oleh karena itu, Arab Saudi memimpin koalisi militer untuk mendukung pemerintah Yaman melawan Houthi dengan tujuan menjaga kepentingan ekonominya sekaligus stabilitas politik kawasan (Ali Aseegaf, 2025).

Konflik di Yaman telah menjadi salah satu krisis kemanusiaan dan keamanan paling kompleks di kawasan Timur Tengah dalam satu dekade terakhir. Akar permasalahan konflik ini bermula dari kegagalan transisi politik pasca Arab Spring tahun 2011, yang menumbangkan Presiden Ali Abdullah

Saleh dan mengangkat Abdrabbuh Mansour Hadi sebagai presiden baru (Bhasuki, 2019). Namun, masa pemerintahan Hadi justru diwarnai ketidakstabilan politik, maraknya korupsi, meningkatnya pengangguran, serta ketidakpuasan sejumlah kelompok, terutama kelompok Houthi yang merasa termarginalkan secara politik dan ekonomi (Indriarto, 2021).

Konflik yang berlangsung di Yaman sangat terkait dengan dinamika ideologi, politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah Timur Tengah. Yaman, yang dihuni oleh mayoritas Muslim yang terdiri dari 57% Sunni dan 43% Syiah, menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan stabilitas dan kepentingan nasionalnya ketika terjadi konflik horizontal antar kelompok dalam negeri. Upaya rekonsiliasi di Yaman merujuk pada berbagai usaha yang dilakukan untuk mengembalikan perdamaian dan kestabilan di negara tersebut (Wibowo and Zamzamy, 2015)

Konflik ini mencerminkan ketegangan komprehensif yang melibatkan faktor agama dan politik, serta dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi penduduk Yaman. Kompleksitas ini membuat proses menjaga otoritas negara menjadi sangat berat, terutama dengan adanya tekanan internal dan pengaruh regional. Rekonsiliasi menjadi kunci penting demi pemulihan kondisi negara dari krisis yang berkepanjangan (Lubis and Astuti, 2024).

Kelompok Houthi, yang berbasis di wilayah utara dan berafiliasi dengan komunitas Syiah Zaidi, memanfaatkan situasi tersebut untuk memperluas pengaruhnya (Maulana, 2019). Pada tahun 2014, Houthi berhasil merebut ibu kota Sanaa, memaksa Presiden Hadi melarikan diri ke Arab Saudi, dan mendeklarasikan pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Muhammad Ali Al-Houthi. Kondisi ini mendorong Presiden Hadi meminta bantuan militer kepada Arab Saudi dan koalisi negara Arab lainnya. Arab Saudi kemudian memulai intervensi militer pada Maret 2015 melalui operasi udara berskala besar yang bertujuan mengembalikan pemerintahan Hadi dan menahan laju ekspansi Houthi yang diduga mendapat dukungan dari Iran (Priambodo, 2017).

Konflik Yaman pada 2015 dipicu oleh berbagai faktor. Pada 2015, pemberontak Houthi berhasil menguasai ibu kota Yaman, Sana'a, sehingga menimbulkan ketidakstabilan dan mengganggu keamanan negara-negara tetangga termasuk Arab Saudi. Konflik internal Yaman melibatkan dua kekuatan utama yakni pemerintah Yaman dan kelompok Houthi, yang menentang pemerintah yang dipimpin Abd Rabbuh Mansour Hadi. Kelompok Houthi awalnya berasal dari komunitas Syiah Zaidi di Yaman Utara dan mendapat dukungan ideologis serta bantuan ekonomi dan militer dari Iran.

Kondisi ini memunculkan ketegangan di kawasan dan membuat Arab Saudi dan koalisinya merasa terancam sehingga memutuskan melakukan intervensi militer besar-besaran pada Maret 2015 dengan tujuan menghancurkan pemberontak Houthi, dan mulai melakukan blokade darat, laut dan udara. Dalam meluncurkan intervensinya, Arab Saudi dan koalisinya meluncurkan senjata peledak yang mencakup berbagai persenjataan, tetapi di Yaman istilah ini sebagian besar mengacu pada sistem penembakan tidak langsung seperti roket dan mortir. Senjata-senjata ini bertanggung jawab atas 23 persen dari kematian dan luka-luka warga sipil yang tercatat akibat senjata peledak di Yaman. *Action on Armed Violence (AOAV)* mencatat 1.037 kematian dan luka-luka warga sipil dari penggunaan peluru artileri, mortir dan roket di 40 Yaman hingga 31 Juli 2015. Secara total, 1.104 kematian dan cedera dicatat yang berarti bahwa warga sipil merupakan 94 persen dari catatan kematian dan cedera akibat senjata peledak yang diluncurkan (Hadi *et al.*, 2023)

Koalisi Arab Saudi lahir dari Liga Arab yang merupakan organisasi regional yang didirikan pada 22 Maret 1945 melalui Protokol Aleksandria, melibatkan negara-negara seperti Mesir, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Suriah, dan Yaman Utara sebagai pendiri awal. Saat ini, Liga Arab memiliki 22 negara anggota, dengan markas besar di Kairo, Mesir, dan tujuannya mencakup mempererat hubungan persaudaraan antarnegara Arab, menjaga kemerdekaan serta kedaulatan, mengkoordinasikan kebijakan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menyelesaikan perselisihan secara damai. Strukturnya dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, Majelis Tinggi (kepala negara

anggota), dan Dewan Menteri Luar Negeri, dengan pengambilan keputusan melalui konsensus atau mayoritas suara yang hanya mengikat bagi pendukungnya, mencerminkan karakter longgar organisasi ini (Sugito, 2017). Hubungan Liga Arab dengan Koalisi Arab yang mengintervensi Houthi di Yaman menunjukkan dinamika solidaritas regional dalam menghadapi ancaman keamanan. Pada 2015, pemberontak Houthi (Ansar Allah) merebut kekuasaan di Yaman, menggulingkan Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi yang diakui secara internasional, memicu kekhawatiran atas pengaruh Iran di kawasan. Liga Arab merespons dengan Resolusi Darurat pada 26 Maret 2015, mendukung intervensi militer untuk memulihkan pemerintahan Hadi dan melindungi integritas Yaman dari "agresi Houthi". Koalisi yang dipimpin Saudi Arabia—melibatkan UEA, Bahrain, Qatar (kemudian keluar), Mesir, Yordania, Sudan, dan lainnya—melancarkan Operasi Badai (Decisive Storm) berupa serangan udara dan darat terhadap posisi Houthi (Annisa and Burhanuddin, 2024)

Sejak 2015, eskalasi militer koalisi yang dipimpin Arab Saudi justru memperumit dinamika konflik. Koalisi Arab Saudi tidak hanya menghadapi kelompok Houthi, tetapi juga harus berhadapan dengan kelompok bersenjata lain seperti AQAP (Al-Qaeda in the Arabian Peninsula) dan ISIS, serta dampak blokade yang memperparah krisis kemanusiaan di Yaman. Intervensi ini menandai pergeseran konflik internal menjadi perang proksi (proxy war) yang melibatkan kepentingan negara-negara besar, terutama Arab Saudi dan Iran, sehingga memperpanjang dan memperdalam instabilitas di Yaman (Farras, 2020). Meskipun telah berlangsung selama beberapa tahun, intervensi militer koalisi Arab Saudi terbukti tidak efektif dalam menumpas kekuatan Houthi. Houthi tetap menguasai wilayah strategis di Yaman utara dan bahkan mampu melancarkan serangan balik ke wilayah Arab Saudi. Di sisi lain, operasi militer dan blokade yang dilakukan koalisi justru memperburuk kondisi kemanusiaan, menyebabkan ribuan korban jiwa dan jutaan warga Yaman mengungsi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas strategi militer koalisi Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik Yaman, khususnya dalam periode 2015–2020 (Hadi *et al.*, 2023).

koalisi arab terhadap konflik houthi periode 2015-2020 menunjukkan bahwa koalisi pimpinan Saudi secara konsisten gagal mencapai tujuan utamanya, yaitu melemahkan secara signifikan gerakan Houthi dan memulihkan otoritas pemerintah yang diakui secara internasional. Meskipun melakukan serangan udara yang intens dan blokade yang komprehensif, koalisi tidak berhasil merebut kembali wilayah utama yang dikuasai oleh Houthi, yang terus mempertahankan dan bahkan meningkatkan kemampuan militer mereka. Ketidakmampuan koalisi untuk mencapai kemenangan militer yang menentukan menggarisbawahi keterbatasan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik internal yang kompleks.

Bukti paling mencolok dari kegagalan intervensi koalisi adalah memburuknya krisis kemanusiaan di Yaman selama periode 2015-2020. Peningkatan dramatis jumlah korban sipil, pengungsian massal, kerawanan pangan yang meluas, dan wabah penyakit yang meluas menunjukkan bahwa intervensi tersebut tidak hanya gagal membawa stabilitas dan keamanan tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap penderitaan penduduk Yaman, berdasarkan data mengenai korban jiwa menurut OCHA (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) tercatat dari tahun 2015-2020 mencapai diangka 11.322 naik hingga 17.500 dimana angka tersebut cenderung terus meningkat pertahunnya, adapun Blokade dan serangan udara koalisi berdampak dahsyat bagi warga sipil, memperparah krisis dan menimbulkan pertanyaan serius tentang proporsionalitas dan legalitas tindakan koalisi dan tercatat ada 20.100 serangan udara yang dilakukan koalisi dari tahun 2015- 2020.

Upaya rekonsiliasi di Yaman menjadi fokus utama komunitas internasional sebagai langkah mengakhiri konflik dan krisis kemanusiaan yang sangat parah. Proses rekonsiliasi melibatkan berbagai aktor seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara-negara regional, dan organisasi kemanusiaan. Meskipun sudah ada beberapa inisiatif, konflik di Yaman masih berlanjut, dengan tekanan utama dalam upaya rekonsiliasi berfokus pada penciptaan perdamaian untuk kemanusiaan di kawasan tersebut. Dalam konteks politik, rekonsiliasi juga mengurai aliansi yang melibatkan Arab Saudi, negara mayoritas Sunni yang

menjadi pemain kunci dalam mempengaruhi politik dan keamanan di Yaman, serta Iran, negara mayoritas Syiah yang juga berperan besar dalam politik Yaman. Kesepakatan antara kedua kekuatan regional ini menjadi sangat penting untuk membangun masa depan Yaman yang lebih stabil dan menjaga keseimbangan di Timur Tengah (Hadi, 2024)

Kegagalan koalisi yang dipimpin Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik dengan kelompok Houthi movement di Yaman periode 2015–2020 dapat dilihat secara deskriptif melalui tiga indikator utama: kegagalan militer, kegagalan deterensi, dan memburuknya krisis kemanusiaan.

Pertama, dari sisi militer, koalisi memulai intervensi melalui Operasi Decisive Storm pada Maret 2015 dengan tujuan mengembalikan pemerintahan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi serta menumpas Houthi yang menguasai Sana'a. Koalisi mengandalkan superioritas udara dan blokade laut. Namun, meskipun ribuan serangan udara dilancarkan, Houthi tetap mampu mempertahankan wilayah strategis di Yaman utara. Data menunjukkan bahwa sepanjang 2015–2020 terjadi lebih dari 20.000 hingga 60.000 serangan udara, tetapi tidak menghasilkan kemenangan militer yang menentukan. Bahkan sejak 2019, Houthi justru mampu melakukan serangan balik lintas batas ke wilayah Saudi menggunakan rudal balistik dan drone, termasuk serangan terhadap fasilitas minyak Aramco pada 2019 yang sempat melumpuhkan sekitar 5% pasokan minyak global. Hal ini menunjukkan kegagalan fungsi deterensi koalisi.

Kedua, kegagalan deterensi agresi terlihat dari tidak tercapainya efek jera terhadap Houthi. Dalam perspektif teori keamanan kolektif Hans Morgenthau, kekuatan gabungan harus menciptakan pencegahan permanen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan Houthi justru beradaptasi dengan taktik perang asimetris dan gerilya. Serangan terhadap Najran, Jizan, hingga Riyadh membuktikan bahwa koalisi tidak mampu menciptakan rasa takut atau menghalangi kapasitas ofensif Houthi. Fragmentasi internal koalisi juga memperlemah komitmen bersama; misalnya

perbedaan kepentingan antara Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dalam isu Yaman selatan.

Ketiga, bukti paling nyata kegagalan koalisi adalah memburuknya krisis kemanusiaan. Menurut laporan United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), korban sipil pada periode 2015–2020 mencapai lebih dari 17.500 jiwa dan terus meningkat. UNICEF melaporkan lebih dari dua juta anak mengalami malnutrisi akut. Blokade laut dan udara menyebabkan kelangkaan pangan, bahan bakar, serta runtuhnya sistem kesehatan. Organisasi seperti Human Rights Watch dan Amnesty International mencatat adanya dugaan pelanggaran hukum humaniter internasional akibat serangan terhadap infrastruktur sipil. Dengan demikian, secara empiris koalisi Arab Saudi gagal mencapai tujuan politik-militernya, gagal menciptakan deterensi efektif, serta justru memperparah krisis kemanusiaan. Intervensi ini memperlihatkan keterbatasan pendekatan militer dalam menyelesaikan konflik internal kompleks yang telah bertransformasi menjadi perang proksi regional.

Pengalaman intervensi pimpinan Saudi di Yaman memberikan pelajaran penting tentang tantangan dan keterbatasan intervensi militer eksternal dalam konflik internal. Konflik ini menyoroti perlunya pergeseran menuju solusi diplomatik dan politik inklusif yang mengatasi akar penyebab konflik dan melibatkan semua pemangku kepentingan Yaman yang relevan. Sifat konflik yang berkepanjangan dan konsekuensi kemanusiaan yang dahsyat menggarisbawahi pentingnya aktor internasional memprioritaskan perlindungan sipil dan memastikan akses kemanusiaan tanpa hambatan dalam upaya resolusi konflik di masa depan di kawasan tersebut.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya menganalisis strategi militer koalisi Arab Saudi, baik dari sisi keberhasilan militer maupun dampak kemanusiaan dan politiknya, guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dalam penyelesaian konflik Yaman. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai konflik internasional dan perang proksi

di Timur Tengah, serta memberikan kontribusi bagi pengambilan kebijakan luar negeri Arab Saudi dalam merespons isu kemanusiaan global.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa koalisi Arab Saudi mengalami kegagalan dalam menyelesaikan konflik militer di Yaman pada tahun 2015-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran koalisi Arab Saudi dalam mengatasi konflik Houthi di Yaman.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan peran koalisi Arab Saudi dalam mengatasi konflik di Yaman.
3. Untuk mengevaluasi implikasi dari peran koalisi Arab terhadap
4. perubahan kondisi dampak perang pada 2015-2020.

Secara praktis penelitian ini dapat menghasilkan wawasan berharga bagi para pembaca dan membantu untuk lebih memahami bagaimana peta konflik Timur Tengah, penelitian ini juga dapat membantu aktor-aktor internasional dan negara-negara Arab untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik terkait dinamika konflik Timur Tengah dan dapat memotivasi sikap dasar tindakan koalisi Arab Saudi dalam menyelesaikan konflik Yaman.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun harapan penulis dari hasil penelitian ini dapat memberi manfaat secara teoritis yakni:

Pengembangan kebijakan diplomasi yang lebih relevan dalam mengatasi konflik Houthi di Yaman serta peningkatan kesadaran dunia internasional terkait keamanan regional terhadap dampak buruk perang. Selain itu juga bagi aktor internasional seperti koalisi Arab Saudi menekankan kepada pengembangan strategi yang lebih efektif bagi koalisi Arab Saudi dalam mengatasi penyerangan terhadap perompak Houthi di Yaman.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini menggunakan prosedur dengan tujuan memperoleh